

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN
TAHUN 2025-2029**

Tabel 1 IKP Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 2025-2029

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	Persentase	-	100	100	-	-
2	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Indeks	94	94,25	94,50	94,75	95
3	Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN	Presentase	100	100	100	100	100
4	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi	Persentase	90	95	95	95	95

	Manajemen ASN						
5	Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	Persentase	50	65	80	100	100
6	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi	Persentase	30	90	100	100	100
7	Persentase pencapaian kriteria Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) Tier 3 Data Center	Persentase	9%	NA	NA	NA	NA
8	Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Indeks	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
9	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	Persentase	NA	40	60	80	100
10	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Indeks	70	74	74.25	74.50	74.75
11	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi	Persentase	100	100	100	100	100

	Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN						
12	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100
13	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	99	99	99	99	99
14	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2026 di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Rasio	0	0	0	0	0

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKP 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN

Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi
Deskripsi Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi bermakna bahwa setiap kebijakan manajemen ASN dipatuhi oleh K/L/D. Peningkatan kepatuhan ditandai dengan semakin turunnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip meritokrasi.
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di kelompok kerja yang telah ditetapkan.
	Formula
	$N = A/B \times 100\%$
	N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☒ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKU	Seluruh unit kerja/Kelompok Kerja			
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan

Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan
-----------------	--

IKP 2. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas unggul.
Indikator Kinerja Program	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
Formula	Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: A = 88,31 - 100 (Sangat Baik) B = 76,61 - 88,30 (Baik) C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik) D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN oleh BKN.

Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat			
Jenis Perhitungan Data	() Nilai Posisi Akhir		(√) Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	1. Responden survei tidak representatif atau partisipasi rendah. 2. Keterlambatan pelaksanaan survei dan pengolahan data IKM.			
Mitigasi Risiko	6. Melakukan sosialisasi pelaksanaan survei, memperluas cakupan responden secara proporsional antar segmen pengguna layanan, dan menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan PermenPANRB. 7. Menetapkan jadwal pelaksanaan survei sejak awal tahun, membangun sistem pemantauan progres pelaksanaan			

	survei, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengolahan data.
--	---

IKP 3. Capaian Persentase Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul			
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas unggul.			
Indikator Kinerja Program	Capaian persentase Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Jumlah inovasi layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Inovasi yang direalisasikan}}{\text{Jumlah Inovasi yang direncanakan}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	1. Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN,			

	2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, 3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, 4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan 5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata		
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data	() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Perencanaan inovasi tidak realistis atau tidak berbasis kebutuhan pengguna layanan.			
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKP 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas unggul.
Indikator Kinerja Program	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Deskripsi Indikator Kinerja Program	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah surat yang dijawab tepat waktu}}{\text{Jumlah surat yang dijawab}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	1. Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, 2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, 3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, 4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan 5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	

Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Surat memerlukan analisis teknis mendalam atau pertimbangan kebijakan yang memakan waktu.			
Mitigasi Risiko	Menetapkan klasifikasi jenis surat (reguler, teknis, kebijakan) dengan SLA berbeda, serta memastikan komunikasi sementara kepada pengirim mengenai status penanganan surat.			

IKP 5. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman.
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Program	Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Indikator ini menggambarkan keterhubungan Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada Layanan Digital Manajemen ASN, yang diukur dengan rata-rata capaian progress keterhubungan data riwayat profil asn dari seluruh instansi. Adapun progress keterhubungan dilihat dari pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data. Adapun Data Riwayat Profil ASN yang diukur yaitu : 1. Riwayat Golongan 2. Riwayat Jabatan 3. Riwayat Pendidikan 4. Riwayat Diklat 5. Riwayat Kinerja 6. Riwayat Kompetensi

	7. Riwayat Potensi 8. Riwayat Hukuman Disiplin 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala 10. Riwayat Keluarga 11. Riwayat Penghargaan Parameter instansi dinyatakan telah terhitung terintegrasi adalah dengan melihat keterhubungan datanya yang diukur dengan capaian persentase pemutakhiran data masing-masing riwayat profil ASN sesuai dengan persentase minimal sebagai berikut: 1. Riwayat Golongan : 20% 2. Riwayat Jabatan : 30% 3. Riwayat Pendidikan : 11% 4. Riwayat Diklat : 30% 5. Riwayat Kinerja : 100% 6. Riwayat Kompetensi : 8% 7. Riwayat Potensi : 8% 8. Riwayat Hukuman Disiplin : 0.1% 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala : 25% 10. Riwayat Keluarga : 10% 11. Riwayat Penghargaan : 0.1% Persentase masing-masing riwayat ditentukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Tren rata-rata persentase instansi didalam melakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN melalui pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem selama tahun 2023-2024 2. Kewajiban instansi didalam melaporan riwayat kinerja akhirnya Persentase masing-masing riwayat pada setiap instansi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah dilakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN nya dengan jumlah ASN pada instansi tersebut.
--	--

Formula	<i>Realisasi</i> $= \left(\frac{Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11}{11} \right)$ 1. Riwayat Golongan $Z1 = \left(\frac{X1}{Y1} \right) \times 100\%$ X1 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat golongan Y1 = Jumlah Instansi Pemerintah Z1 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat golongan 2. Riwayat Jabatan $Z2 = \left(\frac{X2}{Y2} \right) \times 100\%$ X2 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat jabatan Y2 = Jumlah Instansi Pemerintah Z2 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat jabatan 3. Riwayat Pendidikan $Z3 = \left(\frac{X3}{Y3} \right) \times 100\%$ X3 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat pendidikan Y3 = Jumlah Instansi Pemerintah Z3 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas
---------	---

	sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat pendidikan
	4. Riwayat Diklat $Z4 = \left(\frac{X4}{Y4} \right) \times 100\%$ X4 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat diklat Y4 = Jumlah Instansi Pemerintah Z4 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat diklat
	5. Riwayat Kinerja $Z5 = \left(\frac{X5}{Y5} \right) \times 100\%$ X5 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kinerja Y5 = Jumlah Instansi Pemerintah Z5 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kinerja
	6. Riwayat Kompetensi $Z6 = \left(\frac{X6}{Y6} \right) \times 100\%$ X6 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kompetensi Y6 = Jumlah Instansi Pemerintah Z6 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas

	sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kompetensi
	7. Riwayat Potensi $Z7 = \left(\frac{X7}{Y7} \right) \times 100\%$ X7 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat potensi Y7 = Jumlah Instansi Pemerintah Z7 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat potensi
	8. Riwayat Hukuman Disiplin $Z8 = \left(\frac{X8}{Y8} \right) \times 100\%$ X8 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat hukuman disiplin Y8 = Jumlah Instansi Pemerintah Z8 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat hukuman disiplin
	9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala $Z9 = \left(\frac{X9}{Y9} \right) \times 100\%$ X9 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kenaikan gaji berkala

	Y9 = Jumlah Instansi Pemerintah Z9 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kenaikan gaji berkala 10. Riwayat Keluarga $Z10 = \left(\frac{X10}{Y10} \right) \times 100\%$ X10 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat keluarga Y10 = Jumlah Instansi Pemerintah Z10 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat keluarga 11. Riwayat Penghargaan $Z11 = \left(\frac{X11}{Y11} \right) \times 100\%$ X11 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat penghargaan Y11 = Jumlah Instansi Pemerintah Z11 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat penghargaan
Tujuan	Terlaksananya Integrasi Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan satu data ASN sehingga menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN, sehingga dapat mendorong maturitas penyelenggaraan Manajemen ASN secara elektronik

Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Hasil perhitungan Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	- Adanya penambahan dan perubahan proses bisnis pada sistem informasi kepegawaian yang mempengaruhi proses Interoperabilitas Sistem Informasi ASN - Tidak adanya integrasi antara sistem informasi pemerintah dengan database BKN berdampak pada kualitas data yang tidak akurat dan tidak valid.			
Mitigasi Risiko	pendampingan dan evaluasi secara berkala perihal progress interoperabilitas Sistem Informasi ASN			

IKP 6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi

Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperable, handal, dan aman.
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi: Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data ASN yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN, aspek yang dipenuhi dengan Predikat Indeks Kualitas Data Sangat Tinggi maupun Tinggi diantaranya: 1. Data ASN yang lengkap yaitu data Pegawai ASN dalam kondisi yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang komprehensif. Indikator yang dinilai diantaranya Belum SKP Tahun Berjalan, Jabatan Kosong, Pendidikan Kosong, TMT PNS Kosong, Gelar Kosong, Email Pribadi Kosong/Salah Format, dan Nomor HP Kosong; 2. Data ASN yang tepat waktu yaitu data Pegawai ASN dalam derajat validitasnya pada aplikasi manajemen kepegawaian terhadap keadaan sebenarnya. Komponen yang dinilai diantaranya Unor Tidak Aktif, Formasi Jabatan Fungsional Belum Diangkat, Masa CPNS Lebih dari 1 Tahun, Struktural Ganda, Telah Masuk BUP tetapi Masih Aktif, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Setelah Tanggal Berakhir;

	3. Data ASN yang akurat yaitu data Pegawai ASN merepresentasikan nilai yang benar terhadap kondisi data. Komponen yang dinilai diantaranya TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS, Jenis Pegawai Dipekerjakan/Diperbantukan Tidak Sesuai, Masa Kerja Kurang dari 2 tahun di Jabatan Struktural, PPPK Salah Kedhuk, NIK Belum Valid, Tingkat Pendidikan Eselon Tidak Memenuhi Syarat, Tahun Pengangkatan PPPK, Tingkat Pendidikan Jabatan Fungsional Tidak Memenuhi Syarat, Pelaksana Nama Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Di bawah Pangkat Minimal; dan 4. Data ASN yang konsisten yaitu data Pegawai ASN selaras dan memiliki hubungan keterpadanan. Komponen yang dinilai diantaranya Komponen TMT CPNS pada NIP PNS, Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN, Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN, dan Komponen Tahun Pengangkatan NI PPPK. Predikat Indeks Kualitas Data ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah. Pengukuran ditargetkan untuk seluruh Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
Formula	Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data.

	Formula : $Realisasi = \left(\frac{X}{Y} \right) \times 100\%$ X = Jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data Y = Jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah			
Tujuan	Mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi pakaikan antar Instansi Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan meningkatnya kualitas data ASN dapat mendorong maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN			
Sumber Data	Nilai Indeks Kualitas Data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikeluarkan/hasil pengukuran oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	

Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data	() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Adanya penambahan dan perubahan proses bisnis pada sistem informasi kepegawaian yang mengakibatkan data yang dihasilkan mempengaruhi hasil pengukuran kualitas data ASN.			
Mitigasi Risiko	Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam dimensi indeks kualitas data Instansi Pemerintah Pusat.			

IKP 7. Persentase Pencapaian Kriteria *Tier Certification of Constructed Facilities* (TCCF) Tier 3 Data Center

Sasaran Program	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Interoperabel, andal dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang Interoperabel, andal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Program	Persentase Pencapaian Kriteria <i>Tier Certification of Constructed Facilities</i> (TCCF) Tier 3 Data Center
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Indikator ini mengukur standarisasi Tier 3 Data Center Target pencapaian TCCF Tier 3 Data Center dalam dua tahun dipilih karena pembangunan dan sertifikasi data center Tier 3 memerlukan waktu yang cukup untuk merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan berbagai komponen yang memenuhi standar ketersediaan dan redundansi yang tinggi. Proses ini melibatkan perencanaan yang cermat untuk

	memastikan bahwa semua infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kriteria yang ketat, termasuk kesiapan operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Dengan jangka waktu dua tahun, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan. Tujuan • Mencapai sertifikasi Tier 3 Data Center yang menunjukkan bahwa fasilitas data center memiliki redundansi dan ketersediaan tinggi, dengan minimal 99.982% uptime tahunan. • Memastikan infrastruktur yang aman, handal, dan dapat mendukung operasi TI kritis di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi. • Meningkatkan kepercayaan dan keamanan data, sekaligus mendukung perkembangan teknologi dan bisnis yang membutuhkan data center dengan tingkat ketersediaan yang tinggi. Kriteria Penilaian • Redundansi Infrastruktur: Data center harus memiliki sistem redundansi untuk semua komponen vital seperti jaringan, daya, dan pendingin. • Ketersediaan Sistem: Data center harus mampu beroperasi dengan minimal 99.982% ketersediaan dalam setahun, mengurangi risiko downtime yang dapat mengganggu operasional. • Perawatan dan Pengelolaan: Harus ada prosedur pemeliharaan rutin dan protokol pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan dan keandalan fasilitas. • Desain dan Konstruksi: Semua aspek desain dan konstruksi harus sesuai dengan pedoman Tier 3, yang melibatkan aspek struktur bangunan, daya, pendinginan, serta sistem keamanan fisik. Target Kegiatan Tahun 2025
--	--

	• Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur: Pada tahun 2025, target utama adalah penyelesaian pembangunan fasilitas fisik dan pemasangan semua infrastruktur utama yang diperlukan untuk memenuhi standar Tier 3. • Pengujian dan Verifikasi: Melakukan uji coba dan verifikasi terhadap sistem redundansi, pemulihan bencana, dan kapasitas daya serta pendinginan, untuk memastikan semua elemen berfungsi sesuai standar. • Sertifikasi TCCF Tier 3: Mengajukan dan memperoleh sertifikasi resmi TCCF Tier 3, yang akan menjadi indikator bahwa fasilitas sudah memenuhi standar internasional untuk data center yang handal dan aman. • Pemeliharaan dan Evaluasi Berkala: Menetapkan jadwal pemeliharaan berkala dan melakukan evaluasi terhadap kinerja data center agar tetap memenuhi standar dan berfungsi optimal sepanjang waktu.			
Formula	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah total kegiatan periode}} \times 100\%$			
Tujuan	Untuk memastikan bahwa data center memiliki kemampuan operasional yang optimal, aman, dan mampu mendukung kebutuhan bisnis yang kritis dengan tingkat keandalan tinggi			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi			

Sumber Data	Laporan Pencapaian Kriteria <i>Tier Certification of Constructed Facilities</i> (TCCF) Tier 3 Data Center Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	1. Waktu pembangunan fasilitas pusat data melebihi masa berlaku sertifikat TCDD; 2. Anggaran untuk pembangunan fasilitas pusat data tidak tersedia.			
Mitigasi Risiko	1. Membuat perencanaan pembangunan pusat data 2. Melakukan kajian risiko sertifikasi TCCF			

IKP 8. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Sasaran Program	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Interoperabel, andal dan aman
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, handal dan aman bermakna bahwa BKN dapat mewujudkan Sistem Informasi Manajemen ASN melalui pengelolaan infrastruktur teknologi, data, arsip kepegawaian dan sistem informasi yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Program	Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS) IKAS merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi penyelenggara Infrastruktur

	Informasi Vital (IIV). Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh. DISCLAIMER: 1. Hasil pengisian dalam dokumen ini menggambarkan kondisi pengelolaan siber yang saat ini terjadi pada institusi responden. 2. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya didistribusikan ke pihak internal BSSN.
Formula	PETUNJUK PENGISIAN: 1. Responden menjawab pertanyaan dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Seluruh pertanyaan wajib diisi oleh Responden. INDIKATOR 1. Identifikasi Aspek identifikasi terdiri dari sub aspek manajemen aset, inventaris, manajemen risiko, prioritas, pelaporan, dan klasifikasi. 2. Proteksi Aspek proteksi terdiri dari sub aspek jaringan, aplikasi, pengguna, manajemen identitas dan akses, cloud, dan data. 3. Deteksi Aspek deteksi terdiri dari sub aspek perubahan, monitor, peringatan, pemberitahuan, intelijen, dan pelaporan. 4. Penanggulangan dan Pemulihan Aspek respon terdiri dari penahanan, penanggulangan, pemulihan, Kegiatan Pasca Insiden, dan pelaporan. LEVEL PENILAIAN Level 1 : Tidak Terukur, Tidak Konsisten, Risiko Tinggi (Implementasi Awal)

	Level 2 : Terorganisir, Tidak Konsisten, Berulang (Implementasi Berulang) Level 3: Terorganisir, Konsisten, Reviu Berkala (Implementasi Terdefinisi) Level 4: Terorganisir, Reviu Berkala, Berkelanjutan (Implementasi Terkelola) Level 5 : Otomatisasi, Terintegrasi, Membudaya (Implementasi Optimal)			
Tujuan	Untuk mengukur tingkat kematangan implementasi keamanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi			
Sumber Data	Laporan Tim Keamanan Informasi			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Target indeks tingkat kematangan siber tidak tercapai			

Mitigasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan BSSN terkait kriteria terbaru
-----------------	---

IKK. 9 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori minimal Lengkap
Deskripsi	Definisi:

Indikator Kinerja utama	Indikator ini menggambarkan tingkat kelengkapan arsip ASN digital pada instansi pemerintah. Penilaian kelengkapan arsip ASN digital dilakukan melalui perhitungan skor arsip berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui DMS, dengan rentang nilai 0–100, yang terdiri atas skor arsip ASN Utama dan skor arsip ASN Kondisional. Skor arsip ASN utama mencakup 8 (delapan) jenis arsip dengan nilai maksimal sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut: 1. Daftar Riwayat Hidup dengan skor 7,5; 2. D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP dengan skor 7,5; 3. SK CPNS dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS dengan skor 7,5; 4. SK PNS dengan skor 7,5; 5. Riwayat pendidikan dengan skor 15; 6. Riwayat kenaikan pangkat dengan skor 15; 7. Riwayat jabatan dengan skor 15; dan 8. Riwayat diklat dengan skor 15. Skor arsip ASN Kondisional mencakup 6 (enam) jenis arsip dengan nilai maksimal 10. Namun, apabila tidak terdapat arsip ASN kondisional, maka skor arsip ASN utama secara otomatis menjadi 100. Rincian arsip kondisional sebagai berikut: 1. SK Pindah Instansi; 2. SK Penyesuaian Masa Kerja; 3. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara; 4. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai; 5. Dokumen Penetapan Angka Kredit; 6. Dokumen Penghargaan. Berdasarkan perolehan nilai, skor kelengkapan arsip ASN digital diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut: a. Nilai skor > 90 dikategorikan Sangat Lengkap; b. Nilai skor 55,6–90 dikategorikan Lengkap; c. Nilai skor 30–55,5 dikategorikan Cukup Lengkap; dan d. Nilai skor < 30 dikategorikan Kurang Lengkap.
--------------------------------	--

Formula:	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: N = Persentase instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN Digital berkategori minimal lengkap A = Jumlah instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN digital berkategori minimal lengkap B = Jumlah instansi pemerintah tahun 2026			
Tujuan	Untuk menilai skor kelengkapan arsip ASN digital sebagai dasar dalam penguatan manajemen ASN berbasis data digital dan peningkatan layanan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/output	() Kualitas/mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital dengan Kategori Minimal Lengkap			
Jenis Penghitungan Data	() Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir			
Status Data	(√) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data			
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara berkala			

IKP 10. Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja																								
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.																								
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN																								
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah gambaran nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.																								
Formula	Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut: <table><thead><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI ANGKA</th><th>INTERPRETASI</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang
KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI																							
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																							
A	>80-90	Memuaskan																							
BB	>70-80	Sangat Baik																							
B	>60-70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30-50	Kurang																							
D	>0-30	Sangat Kurang																							
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;																								

	2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; dan 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome	☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	Pelaporan kinerja tidak disusun secara tepat waktu dan tidak memenuhi kaidah akuntabilitas.			

Mitigasi Risiko	Menetapkan jadwal penyusunan laporan kinerja (LKj) yang disiplin, serta menerapkan mekanisme revidi berjenjang oleh pejabat penanggung jawab kinerja.
-----------------	---

IKP 11. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja			
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.			
Indikator Kinerja Program	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Telah Terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	

Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	Keterlambatan dalam pelaporan dan dokumentasi bukti dukung pelaksanaan RB.			
Mitigasi Risiko	Menetapkan sistem pelaporan berkala, memastikan dokumentasi bukti dukung terkelola dengan baik, dan melaksanakan monitoring triwulanan.			

IKP 12. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.

Indikator Kinerja Program	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Indikator ini mengukur persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.
Formula	Persentase pegawai di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN $Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah pegawai yang melaporkan kinerja harian pada e-kinerja}}{\text{Jumlah pegawai}} \right) \times 100\%$
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang kinerja pegawai 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pegawai 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan efektifitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase

Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta	() Cascading Non Peta	(√) Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	1. Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, 2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, 3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, 4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan 5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Rekapitulasi pada layanan e-kinerja			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	1. Pegawai lupa atau menunda pelaporan harian hingga melewati batas waktu. 2. Kurangnya monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja oleh pejabat penilai.			
Mitigasi Risiko	1. Mengaktifkan notifikasi pengingat harian dan pemberian batas waktu input, serta menerapkan sistem penguncian data setelah periode tertentu.			

	2. Menetapkan mekanisme pemantauan rutin bagi pejabat penilai melalui laporan rekap harian bagi pimpinan unit.
--	--

IKP 13. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja			
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.			
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun Anggaran 2026			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Untuk mengukur keselarasan kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan pemanfaatan anggaran yang direncanakan			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	

Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☒ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	1. Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, 2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, 3. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, 4. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan 5. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	http://spanint.kemenkeu.go.id/ https://sakti.kemenkeu.go.id/			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Daftar Risiko	1. Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung realisasi anggaran oleh unit pelaksana. 2. Kegiatan yang direncanakan mengalami hambatan teknis atau non-teknis di lapangan.			
Mitigasi Risiko	1. Menetapkan batas waktu penyampaian dokumen, melakukan monitoring rutin terhadap progres pelaksanaan, dan memberikan pendampingan administrasi keuangan kepada unit pelaksana. 2. Melakukan identifikasi risiko kegiatan sejak tahap perencanaan, menyediakan rencana kontinjensi, dan mempercepat mekanisme revisi jika terdapat perubahan kondisi lapangan.			

IKP 14. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan

Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja			
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.			
Indikator Kinerja Program	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Jumlah temuan hasil audit operasional atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat terhadap total kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang diaudit. Rasio ini mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah temuan audit}}{\text{Jumlah objek yang diaudit}} \right)$			
Tujuan	Rasio temuan hasil audit digunakan untuk menilai tingkat risiko, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam hal anggaran.			
Satuan Pengukuran	Rasio			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKP	4. Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, 5. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN, 6. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN, 7. Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi, dan 8. Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Oleh BPK/Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize	(√) Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebelumnya.			
Mitigasi Risiko	Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil audit, memantau progres penyelesaian secara triwulanan, dan melaporkan realisasi tindak lanjut kepada Inspektorat.			

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT ARSIP KEPEGAWAIAN ASN TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK. 1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK. 1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraa n manajemen ASN	%	-	100%	100%	-	-
		IKK. 2	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Paket	1	1	1	1	1
		IKK. 3	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	%	90	95	95	95	95
SK. 2	Meningkatnya maturitas penyelenggaran manajemen ASN secara elektronik	IKK 4	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital	%	100	100	100	100	100
		IKK. 5	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	%	50 (Kategori Terisi)	-	-	-	-
			Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal	%	-	60	75	85	100

			Lengkap						
		6.	Persentase Pelaksanaan Supervisi Pengelolaan Arsip Kepegawaian di Kantor Regional	%	100	-	-	-	-
		7.	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian	%	100	100	100	100	100
		8.	Persentase Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	%	100	-	-	-	-
		9.	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kepegawaian	%	100	-	-	-	-
SK. 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	10.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	%	99	-	-	-	-

-

		11.	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemer iksaan oleh BPK/Inspekt orat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	Nilai	0	-	-	-	-
--	--	-----	---	-------	---	---	---	---	---

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.			
Formula	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	

Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKK 2. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Arsip Kepegawaian ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.			
Formula	Jumlah Paket Inovasi = Total Paket Inovasi yang dihasilkan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome	☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Laporan Inovasi Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKK 3. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri.			
Formula	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN A = Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti			
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN dapat diselesaikan tepat waktu.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Menetapkan klasifikasi jenis surat (reguler, teknis, kebijakan) dengan SLA berbeda, serta memastikan komunikasi sementara kepada pengirim mengenai status penanganan surat.			

IKK. 4 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indikator ini menggambarkan pencatatan daftar isi tata naskah instansi pusat melalui proses pendataan dan penempatan tata naskah pada lokasi fisik sesuai klasifikasi sehingga keberadaan tata naskah dapat ditelusuri dengan mudah, cepat, dan tepat dan memastikan ada/ tidaknya tata naskah.			
Formula	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: N = Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital A = Jumlah tata naskah instansi pusat yang telah dilakukan pencatatan daftar isi tata naskah B = Jumlah tata naskah instansi pusat yang dikelola tahun 2026 Jumlah tata naskah Instansi Pusat yang dikelola tahun 2026: 985.759 NIP			
Tujuan	1. Untuk memastikan jumlah tata naskah yang seharusnya dikelola sampai dilakukan penyusutan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip; 2. Untuk memudahkan pencarian tata naskah dengan mudah, cepat, dan tepat.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/output	() Kualitas/mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak diturunka n

Unit Pihak Penanggung jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan Monitoring Pencatatan Daftar Isi Tata Naskah			
Jenis Penghitungan Data	☐ Rata-rata		☒ Nilai Posisi Akhir	
Status Data	☒ Hasil Penghitungan Raw Data		☐ Raw Data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	Mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital pengelolaan arsip.			

IKK. 5 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori minimal Lengkap
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi: Indikator ini menggambarkan tingkat kelengkapan arsip ASN digital pada instansi pemerintah. Penilaian kelengkapan arsip ASN digital dilakukan melalui perhitungan skor arsip berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui DMS, dengan rentang nilai 0–100, yang terdiri atas skor arsip ASN Utama dan skor arsip ASN Kondisional. - Skor arsip ASN utama mencakup 8 (delapan) jenis arsip dengan nilai maksimal sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut: - Daftar Riwayat Hidup dengan skor 7,5; - D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP dengan skor 7,5; - SK CPNS dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS dengan skor 7,5; - SK PNS dengan skor 7,5; - Riwayat pendidikan dengan skor 15; - Riwayat kenaikan pangkat dengan skor 15; - Riwayat jabatan dengan skor 15; dan - Riwayat diklat dengan skor 15. - Skor arsip ASN Kondisional mencakup 6 (enam) jenis arsip dengan nilai maksimal 10. Namun, apabila tidak terdapat arsip ASN kondisional, maka skor arsip ASN utama secara otomatis menjadi 100. Rincian arsip kondisional sebagai berikut: - SK Pindah Instansi; - SK Penyesuaian Masa Kerja; - SK Cuti di Luar Tangguangan Negara; - Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai; - Dokumen Penetapan Angka Kredit; - Dokumen Penghargaan. Berdasarkan perolehan nilai, skor kelengkapan arsip ASN digital diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

	a. Nilai skor > 90 dikategorikan Sangat Lengkap; b. Nilai skor 55,6–90 dikategorikan Lengkap; c. Nilai skor 30–55,5 dikategorikan Cukup Lengkap; dan d. Nilai skor < 30 dikategorikan Kurang Lengkap.			
Formula:	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: N = Persentase instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN Digital berkategori minimal lengkap A = Jumlah instansi pusat dengan skor kelengkapan arsip ASN digital berkategori minimal lengkap B = Jumlah instansi pusat tahun 2026			
Tujuan	Untuk menilai skor kelengkapan arsip ASN digital sebagai dasar dalam penguatan manajemen ASN berbasis data digital dan peningkatan layanan			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/output	() Kualitas/mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak diturunkan
Unit Penanggung jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital dengan Kategori Mininmal Lengkap			
Jenis Penghitungan Data	() Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir			
Status Data	(√) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data			
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara berkala			

IKK. 6 Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indikator menggambarkan kegiatan pemantauan, pengumpulan data dan pemberian rekomendasi atas pengelolaan arsip kepegawaian sesuai dengan kebijakan pedoman dan standar yang berlaku.			
Formula	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: N = Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian A = Jumlah kegiatan Monev yang direalisasikan B = Jumlah kegiatan Monev yang direncanakan			
Tujuan	1. Mengetahui sejauh mana kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip kepegawaian telah dilaksanakan sesuai rencana, guna memastikan pengelolaan arsip berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Sebagai dasar rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan arsip kepegawaian			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	()Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	()Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evalausi Pengelolaan Arsip Kepegawaian			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maxsimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√)Triwulan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terlaksana sesuai jadwal			
Mitigasi Risiko	Menetapkan jadwal monev sejak awal tahun dan melakukan pemantauan rutin pelaksanaannya			

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN 2025-2029**

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Instansi yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	%	N/A	100	100	100	100
2.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Penyediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Andal	Indeks	95	95	95	95	95
2.	Jumlah Paket Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Paket	1	1	1	1	1
3.	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) jawaban surat maksimal 5 hari di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	%	90	95	95	95	95
4.	Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK yang aman dan andal	%	99	99	99	99	99
5.	Persentase Tingkat Keamanan Data Layanan Manajemen ASN	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Pencapaian Kriteria <i>Tier Certification of Constructed Facilities</i> (TCCF) Tier 3 Data Center	%	9	N/A	N/A	N/A	N/A
7.	Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Indeks	Level 3	Level 4`	Level 4	Level 4	Level 4
8	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	%	99	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Rasio Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Direktorat	Rasio	0	N/A	N/A	N/A	N/A

	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi						
--	---	--	--	--	--	--	--

MANUAL IKK

DIREKTORAT INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KEAMANAN INFORMASI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 1. Persentase Instansi yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi.
	Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN
	Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
Formula	
$N = A/B \times 100\%$	
N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina	

	A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Pokja Pembinaan			
Sumber Data	Laporan Kegiatan Pembinaan Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	Pengetahuan tidak diterapkan dalam keseharian			
Mitigasi Risiko	Pembaruan konten fryer secara berkala sesuai perkembangan terkini			

IKK 2. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Penyediaan Infrastruktur TIK yang aman dan andal

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 2. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Penyediaan Infrastruktur TIK yang Aman dan Andal
	Definisi

Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran ini mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi yang terdiri dari Layanan Pusat Data, Layanan Komunikasi dan Kanal Informasi, dan Layanan Keamanan Informasi			
	Formula			
	Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur teknologi informasi			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Pokja Indeks kepuasan Layanan INTIKAMI			
Sumber Data	Hasil penghitungan survei terhadap layanan infrastruktur TI			
Jenis Perhitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir		☒ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	1. Sample kurang dari target yang ditentukan; 2. Nilai indeks kepuasan tidak mencapai target; 3. Responden memberikan nilai rendah pada salah satu/beberapa unsur SKM;			
Mitigasi Risiko	Melakukan pemantauan pencatatan pemenuhan layanan infrastruktur TI dan keamanan informasi			

IKK 3. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pengembangan dan implementasi paket inovasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan

	keamanan informasi secara signifikan di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 3. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Mengukur jumlah paket inovasi yang dirancang, dikembangkan, dan/atau diimplementasikan oleh Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, termasuk aspek infrastruktur, keamanan informasi, dan efisiensi layanan internal maupun eksternal.			
	Formula			
	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi Formula : Jumlah Paket Inovasi = $\sum$ (Inovasi yang dikembangkan dan/atau diimplementasikan dalam tahun berjalan)			
Tujuan	Mewujudkan inovasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan, maupun kepuasan pengguna layanan.			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Pokja Tata Kelola Sub Manajemen Perubahan dan Inovasi			
Sumber Data	Hasil kinerja Tim Pokja Inovasi Direktorat INTIKAMI			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	Kegagalan mewujudkan inovasi			
Mitigasi Risiko	Membuat timeline perencanaan kegiatan dan anggaran			

IKK 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) jawaban surat maksimal 5 hari di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Mengukur dan memastikan tingkat kepatuhan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi dalam menindaklanjuti surat masuk sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 4 hari kerja.			
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 4. Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Mengukur kepatuhan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi dalam menindaklanjuti surat masuk tepat waktu berdasarkan komitmen Direktorat dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat, akurat, berintegritas, dan terstandar, serta mendukung terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang profesional dan akuntabel.			
	Formula			
	Persentase SLA Jawaban Surat : $\frac{\text{Jumlah surat yang dijawab} \leq 4 \text{ hari}}{\text{Jumlah surat yang masuk}} \times 100\%$			
Tujuan	Menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi surat menyurat yang cepat, tepat, dan terstandar di lingkungan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi serta meningkatkan akuntabilitas, disiplin, serta profesionalisme pegawai dalam memberikan layanan administrasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas, responsif, dan sesuai standar kualitas pelayanan publik.			
Satuan Pengukuran	Persentase (%)			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Pokja Pengelola Layanan INTIKAMI (<i>Service Desk</i>)			
Sumber Data	Laporan Pokja Pengelola Layanan INTIKAMI (<i>Service Desk</i>)			

Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data	() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√) Tahunan
Daftar Risiko	SLA jawaban surat melebihi 4 hari kerja		
Mitigasi Risiko	Melakukan pemantauan pencatatan persuratan Direktorat Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi		

IKK 5. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang aman dan andal

Sasaran Program	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang <i>Interoperable</i> , andal dan aman
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan tingkat kematangan dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan proses terkait ASN. Ini mencakup efisiensi, akurasi, transparansi, dan pemanfaatan data yang lebih baik dalam manajemen ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 5. Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang aman dan andal
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator Ketersediaan Infrastruktur TIK merupakan gabungan dari ketersediaan 2 layanan, yaitu : • Layanan Pusat Data (L1) • Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi (L2) Formula $IKK\ 1 = (L1+L2)/n$ Keterangan : n = Jumlah Capaian Layanan yang terpenuhi L1 (Layanan Pusat Data) Layanan Pusat Data adalah layanan yang menyediakan sumberdaya <i>data center</i> untuk dipergunakan oleh unit kerja agar dapat menempatkan aplikasi atau sistem informasi di internet. Berikut formula capaian untuk layanan pusat komputasi: $L1 = ((X1/X2 * 100\%) + Y1 + Z1) / 3$ Keterangan : L1 = Capaian layanan Pusat Data X1 = Jumlah Layanan Pusat Data yang Terpenuhi X2 = Jumlah Permintaan Layanan Pusat Data Y1 = Persentase durasi tersedianya jaringan komunikasi Pusat Data

	Z1 = Persentase durasi tersedianya fasilitas pendukung Pusat Data • Layanan Pusat Data yang dimaksud meliputi sumber daya komputasi, penyimpanan data dan <i>backup</i>, dan <i>Software/Platform</i>. • Jaringan Komunikasi Pusat Data yang dimaksud adalah jaringan komunikasi Pusat Data untuk sistem aplikasi yang ditempatkan pada Pusat Data BKN agar dapat diakses oleh publik secara luas. • Fasilitas pendukung Pusat Data yang dimaksud meliputi fasilitas pendukung Pusat Data, yaitu kelistrikan, pendingin ruangan, akses pusat data, dan sistem pemadam kebakaran. • Target untuk Layanan Pusat Data (L1) adalah 98% setiap tahunnya dihitung rata – rata capaian permintaan layanan pusat komputasi (X1/X2) sebesar 100%, durasi tersedianya jaringan komunikasi Pusat Data (Y1) sebesar 97.5%, dan durasi tersedianya fasilitas pendukung pusat data (Z1) sebesar 97.5%. L2 (Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi) Layanan Kanal Informasi dan Komunikasi merupakan layanan yang menyediakan jaringan intranet dan internet kantor, surat elektronik, suara dan konektivitas video kepada pegawai maupun unit kerja BKN. Layanan ini terdiri dari : • Jaringan Intranet dan Internet Kantor Jaringan Intranet (Z1) Jaringan intranet adalah layanan jalur komunikasi/ jaringan internal BKN. Layanan intranet sendiri terdiri dari layanan VPN IPsec, layanan <i>wi-fi</i> (nirkabel) di lingkungan kantor BKN Pusat dan layanan <i>wire/kabel</i> di lingkungan kantor BKN Pusat. Layanan VPN sendiri merupakan jalur komunikasi yang disediakan untuk Kantor Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kantor Regional BKN, Kantor UPT BKN, dan DRC. Berikut formula capaian layanan intranet : $Z1 = (X1/Y1) \times 100\%$ Keterangan : Z1 = Persentase Capaian Layanan Intranet X1 = Jumlah Layanan Intranet yang diberikan Y1 = Jumlah Permintaan Layanan Intranet Jaringan Internet (Z2) Target durasi internet pada kantor BKN aktif dalam satu tahun yaitu 97,5% atau sekitar 8541 jam selama satu tahun. Durasi internet pada kantor BKN aktif ditentukan dari rata-rata tersedianya layanan internet selama satu tahun. Berikut formula capaian layanan internet : $Z2 = (X2/Y2) \times 100\%$
--	--

Keterangan :

Z2 = Persentase Capaian Layanan Internet

X2 = Durasi Layanan Internet aktif (jam)

Y2 = 8760 jam (jumlah jam dalam satu tahun)

- Email (Z3)

Layanan email merupakan sarana komunikasi resmi seluruh pegawai BKN. Layanan Email yang dimaksud adalah :

1. Pembuatan akun email baru.
2. Reset password email.
3. Penghapusan akun email.

Berikut perhitungan capaian layanan email :

$$Z3 = ((X3/Y3) \times 100\%$$

Keterangan :

Z3 = Persentase Capaian Layanan Email

X3 = Jumlah Permintaan layanan email yang diberikan

Y3 = Jumlah Permintaan layanan email

- Layanan Kolaborasi Drive (Z4)

Layanan Kolaborasi Drive adalah layanan berbagi pakai berupa tempat penyimpanan virtual untuk foto, video, dokumen dan file kedinasan lain. Layanan Kolaborasi Drive antara lain:

1. Pembuatan akun kolaborasi drive.
2. Penambahan kapasitas akun kolaborasi drive.

Berikut formula capaian layanan kolaborasi drive:

$$Z4 = X4/Y4 \times 100\%$$

Keterangan :

Z4 = Persentase Capaian Layanan Kolaborasi *Drive*

X4 = Jumlah permintaan penambahan kapasitas kolaborasi *drive* yang terpenuhi

Y4 = Jumlah permintaan penambahan kapasitas kolaborasi *drive*

- Layanan Konferensi Video (Z5)

Layanan konferensi video merupakan layanan telekomunikasi interaktif untuk kebutuhan komunikasi visual, audio secara real time yang dapat digunakan oleh tiap – tiap unit kerja. Layanan Konferensi Video adalah pemberian tautan Konferensi Video kepada unit kerja.

Formula capaian layanan konferensi video sebagai berikut :

$$Z5 = X5/Y5 \times 100\%$$

Keterangan :

Z5 = Persentase Capaian Layanan Konferensi Video

	X5 = Jumlah Layanan Konferensi Video yang diberikan Y5 = Jumlah Permintaan Layanan Konferensi Video - Layanan Pemeliharaan TV Media (Z6) Layanan Pemeliharaan TV Media adalah Layanan Pemeliharaan Infrastruktur yang mendukung TV Media di Lingkungan Kantor Pusat BKN. Formula capaian layanan TV Media ada sebagai berikut : $Z6 = X6/Y6 \times 100\%$ Keterangan : Z6 = Persentase Capaian Layanan Pemeliharaan TV Media X6 = Jumlah Pemeliharaan TV Media yang terpenuhi Y6 = Jumlah TV Media yang ada di lingkungan BKN Pusat - Penentuan target Target untuk seluruh layanan yang termasuk dalam layanan informasi dan komunikasi adalah 100% setiap tahunnya. Berikut formula akhir untuk perhitungan Layanan Informasi dan Komunikasi (L2) dengan target 99,5 % setiap tahunnya $L2 = (Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6)/n$ n= jumlah capaian layanan yang terpenuhi			
Tujuan	Memastikan ketersediaan infrastruktur TIK yang dapat dimanfaatkan dan diakses secara mudah dan andal.			
Satuan Pengukuran	% (Persentase)			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(☒) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(☒) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(☒) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(☒) Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	1. Pokja Pengelola Pusat Data 2. Pokja Komunikasi Data 3. Pokja Perangkat Pendukung Pusat Data 4. Pokja Layanan Kanal Informasi Sub Tim Email 5. Pokja Layanan Kanal Informasi Sub Tim <i>Video Conference</i> 6. Pokja Tata Kelola Sub Manajemen Risiko 7. Pokja Tata Kelola Sub Manajemen SDM 8. Pokja Tata Kelola Sub Manajemen Data dan Pengetahuan 9. Pokja Perjanjian Kerjasama			
Sumber Data	Laporan Tim Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi			

Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data	() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran
Daftar Risiko	1. Kerusakan perangkat pusat data 2. Gangguan suplai daya disebabkan oleh pemadaman listrik mendadak 3. Pencatatan permohonan/pengaduan tidak sesuai dengan layanan		
Mitigasi Risiko	1. Melakukan pemeliharaan perangkat pusat data 2. Menyiapkan dual homing provider 3. Melakukan reviu katalog layanan Direktorat INTIKAMI		

IKK 6. Persentase Tingkat Keamanan Data Layanan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan tingkat kematangan dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan proses terkait ASN. Ini mencakup efisiensi, akurasi, transparansi, dan pemanfaatan data yang lebih baik dalam manajemen ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 6. Persentase Tingkat Keamanan Data Layanan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Layanan Keamanan Informasi merupakan layanan yang diberikan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi di Badan Kepegawaian Negara. Layanan Keamanan Informasi terdiri dari : • Layanan Pengendalian Kerentanan Keamanan • Layanan Pengendalian Identitas dan Akses • Layanan Edukasi Budaya Kesadaran Keamanan • Layanan Penanganan Insiden Keamanan • Layanan Deteksi Keamanan
	Formula
	Perbandingan antara layanan keamanan informasi yang dilakukan pengendalian kerentanan keamanan, pengendalian identitas dan akses, edukasi budaya kesadaran keamanan, penanganan insiden keamanan, deteksi keamanan selama 1 (satu) tahun. $L3 = ((X1/Y1) + (X2/Y2) + (X3/Y3) + (X4/Y4) + (X5/Y5))/n \times 100\%$ L3 adalah Capaian Layanan Keamanan Informasi X1 adalah jumlah sistem baru dan dikembangkan yang dilakukan pengujian keamanan

	Y1 adalah jumlah sistem baru dan dikembangkan dalam tahun berjalan X2 adalah jumlah akses yang dikendalikan Y2 adalah jumlah permohonan akses yang diajukan X3 adalah jumlah pelaksanaan edukasi budaya kesadaran keamanan informasi Y3 adalah jumlah rencana pelaksanaan edukasi budaya keamanan informasi X4 adalah jumlah insiden keamanan yang direspon Y4 adalah jumlah insiden keamanan yang terjadi X5 adalah jumlah pelaksanaan kegiatan deteksi Y5 adalah jumlah perencanaan kegiatan deteksi n = jumlah layanan yang terpenuhi Kamus Data : • Risiko Keamanan Informasi adalah keadaan yang mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset organisasi • Pengendalian Kerentanan Keamanan Informasi merupakan rangkaian kegiatan mengidentifikasi celah/kerentanan, mengukur tingkat risiko serta menguji keamanan sistem. Jumlah aplikasi yang diuji dalam satu tahun dapat berubah sesuai dengan dinamika perubahan/pengembangan TI di BKN. • Pengendalian Identitas dan Akses adalah mereviu, mengatur dan mengevaluasi permohonan akses dari pihak yang berkepentingan. • Penanganan Insiden Keamanan adalah mereviu, merespon dan melaporkan kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi. • Permohonan Akses adalah pengajuan permohonan berupa form isian/dokumen dari pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan dan kewenangan. • Edukasi Budaya Kesadaran Keamanan Informasi direalisasikan dengan mempublikasikan <i>flyer</i> kesadaran keamanan informasi selama 12 bulan, serta pelaksanaan simulasi dan edukasi. • Deteksi Keamanan adalah kegiatan memantau, memberikan notifikasi terhadap aktivitas mencurigakan terkait keamanan. Penentuan Target 5 (Lima) Tahun : • Target Pengendalian Kerentanan Keamanan Informasi setiap tahunnya adalah 100% • Target Pengendalian Identitas dan Akses setiap tahunnya adalah 100% • Target Penanganan insiden setiap tahunnya adalah 100% • Target pelaksanaan edukasi budaya kesadaran keamanan informasi setiap tahunnya adalah 100%
--	--

	Target pelaksanaan deteksi keamanan informasi setiap tahunnya adalah 100%			
Tujuan	Memastikan bahwa seluruh informasi, sistem, dan layanan teknologi informasi yang digunakan terlindungi dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan (confidentiality) , integritas (integrity) , dan ketersediaan (availability) informasi			
Satuan Pengukuran	% (Persentase)			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	POKJA Keamanan Informasi			
Sumber Data	Laporan kinerja POKJA Tim Keamanan Informasi			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	1. Serangan siber 2. Penyalahgunaan hak akses oleh pengguna yang sah 3. Kerusakan/kebocoran data			
Mitigasi Risiko	Menerapkan dan mematuhi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam ISO 27001			

IKK 7. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Sasaran Program	Terwujudnya Digitalisasi Manajemen ASN yang Interoperabel, handal dan aman
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan tingkat kematangan dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan proses terkait ASN. Ini mencakup efisiensi, akurasi, transparansi, dan pemanfaatan data yang lebih baik dalam manajemen ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 7. Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber
	Definisi

Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS) IKAS merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital (IIV). Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh. DISCLAIMER: 1. Hasil pengisian dalam dokumen ini menggambarkan kondisi pengelolaan siber yang saat ini terjadi pada institusi responden. 2. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya didistribusikan ke pihak internal BSSN. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Responden menjawab pertanyaan dengan cara memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan kondisi saat ini. 2. Seluruh pertanyaan wajib diisi oleh Responden. INDIKATOR Identifikasi Aspek identifikasi terdiri dari sub aspek manajemen aset, inventaris, manajemen risiko, prioritas, pelaporan, dan klasifikasi. Proteksi Aspek proteksi terdiri dari sub aspek jaringan, aplikasi, pengguna, manajemen identitas dan akses, cloud, dan data. Deteksi Aspek deteksi terdiri dari sub aspek perubahan, monitor, peringatan, pemberitahuan, intelijen, dan pelaporan. Penanggulangan dan Pemulihan Aspek respon terdiri dari penahanan, penanggulangan, pemulihan, Kegiatan Pasca Insiden, dan pelaporan. LEVEL PENILAIAN Level 1: Tidak Terukur, Tidak Konsisten, Risiko Tinggi (Implementasi Awal) Level 2: Terorganisir, Tidak Konsisten, Berulang (Implementasi Berulang) Level 3: Terorganisir, Konsisten, Reviu Berkala (Implementasi Terdefinisi) Level 4: Terorganisir, Reviu Berkala, Berkelanjutan (Implementasi Terkelola) Level 5: Otomatisasi, Terintegrasi, Membudaya (Implementasi Optimal)
---	--

	Formula			
	Nilai indeks kematangan keamanan siber diperoleh dari hasil penilaian Instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKAS) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.			
Tujuan	Untuk mengukur tingkat kematangan implementasi keamanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	(☒) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(☒) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(☒) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(☒) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Pokja Keamanan Informasi			
Sumber Data	Laporan Tim Keamanan Informasi			
Jenis Perhitungan Data	(☒) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(☒) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(☒) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(☒) Tahunan
Daftar Risiko	Target indeks tingkat kematangan siber tidak tercapai			
Mitigasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan BSSN terkait kriteria terbaru			

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI ASN TAHUN 2025 - 2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK. 1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK. 1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 2	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN	Persentase	1	1	1	1	1
		IKK. 3	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN	Persentase	90	95	100	100	100
SK. 2	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen	IKK. 4	Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian	Persentase	100	100	100	100	100

	ASN secara elektronik		untuk Pengambilan Keputusan						
		IKK. 5	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi	Persentase	30	90	100	100	100
		IKK. 6	Persentase Ketersediaan Statistik Profil ASN yang Akurat dan Terkini	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 7	Persentase Pemenuhan Kajian Analisis Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 8	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 9	Persentase Kegiatan Statistik ASN Disabilitas Nasional	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 10	Persentase Dukungan Pemanfaatan Data	Persentase	100	100	100	100	100

			ASN Dukungan Program Prioritas Nasional	bagi						
--	--	--	---	------	--	--	--	--	--	--



IKK 1. Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.

Formula	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			

Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKK 2. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan inovasi layanan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.			
Formula	Diukur berdasarkan jumlah inovasi yang direalisasikan dibandingkan dengan jumlah paket inovasi yang direncanakan. Formula : $Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Inovasi yang direalisasikan}}{\text{Jumlah Paket Inovasi yang direncanakan}} \right)$			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Laporan Inovasi Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKK 3. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.			
Formula	Diukur berdasarkan jumlah surat yang dijawab tepat waktu dibandingkan dengan jumlah surat yang dijawab. Formula : $Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah surat yang dijawab tepat waktu}}{\text{Jumlah surat yang dijawab}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN dapat diselesaikan tepat waktu.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			

Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Menetapkan klasifikasi jenis surat (reguler, teknis, kebijakan) dengan SLA berbeda, serta memastikan komunikasi sementara kepada pengirim mengenai status penanganan surat.			

IKK 4. Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemanfaatan Data Kepegawaian untuk Pengambilan Keputusan
Deskripsi Indikator	Indikator menggambarkan pemanfaatan data kepegawaian yang dihasilkan dari Sistem Informasi ASN (SIASN). Pemanfaatan data kepegawaian ini dilakukan melalui

Kinerja Kegiatan	kegiatan-kegiatan seperti dukungan kerjasama pemanfaatan data, pemadanan data, serta dukungan layanan untuk SIASN.
Formula	Diukur berdasarkan jumlah pemenuhan pemanfaatan data kepegawaian dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pemanfaatan pemanfaatan data dikalikan seratus persen. Formula : $Realisasi = \frac{(Z1 + Z2 + Z3)}{3}$ 1. Dukungan kerjasama pemanfaatan data ASN adalah upaya menganalisis dan menyajikan data ASN yang bersumber dari SIASN atau <i>database</i> lainnya untuk dukungan kerjasama pemanfaatan data ASN. Formula : $Z1 = \left(\frac{X1}{Y1} \right) \times 100\%$ X1 = Jumlah pemenuhan dukungan kerjasama pemanfaatan data ASN Y1 = Jumlah permohonan dukungan kerjasama pemanfaatan data ASN Z1 = Persentase dukungan kerjasama pemanfaatan data ASN 2. Pemadanan Data ASN adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk menyandingkan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari SIASN dengan sumber data lain. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikelola memiliki tingkat kelengkapan, kesesuaian, akurasi dan konsistensi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Formula :

	$Z2 = \left(\frac{X2}{Y2} \right) \times 100\%$ X2 = Jumlah pemenuhan pemadanan data ASN Y2 = Jumlah permohonan pemadanan data ASN Z2 = Persentase pemadanan data ASN 3. Dukungan layanan untuk SIASN adalah upaya menganalisis data ASN dalam rangka pengembangan SIASN. Formula : $Z1 = \left(\frac{X1}{Y1} \right) \times 100\%$ X1 = Jumlah pemenuhan dukungan layanan untuk SIASN Y1 = Jumlah permohonan dukungan layanan untuk SIASN Z1 = Persentase dukungan layanan untuk SIASN			
Tujuan	Untuk mewujudkan digitalisasi melalui pemanfaatan data dalam manajemen ASN yang berjalan secara interoperabel dengan sistem lainnya yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan baik di BKN secara nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	

Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Laporan Pemanfaatan Data Kepegawaian			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	Memastikan data dimutakhirkan secara berkala			

IKK 5. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi.

Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah Pusat memiliki data ASN yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN, aspek yang dipenuhi dengan Predikat Indeks Kualitas Data Sangat Tinggi maupun Tinggi diantaranya: 1. Data ASN yang lengkap yaitu data Pegawai ASN dalam kondisi yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang komprehensif. Indikator yang dinilai diantaranya Belum SKP Tahun Berjalan, Jabatan Kosong, Pendidikan Kosong, TMT PNS Kosong, Gelar Kosong, Email Pribadi Kosong/Salah Format, dan Nomor HP Kosong; 2. Data ASN yang tepat waktu yaitu data Pegawai ASN dalam derajat validitasnya pada aplikasi manajemen kepegawaian terhadap keadaan sebenarnya. Komponen yang dinilai diantaranya Unor Tidak Aktif, Formasi Jabatan Fungsional Belum Diangkat, Masa CPNS Lebih dari 1 Tahun, Struktural Ganda, Telah Masuk BUP tetapi Masih Aktif, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Setelah Tanggal Berakhir; 3. Data ASN yang akurat yaitu data Pegawai ASN merepresentasikan nilai yang benar terhadap kondisi data. Komponen yang dinilai diantaranya TMT CPNS Lebih Besar dari TMT PNS, Jenis Pegawai Dipekerjakan/Diperbantukan Tidak Sesuai, Masa Kerja Kurang dari 2 tahun di Jabatan Struktural, PPPK Salah Kedhuk, NIK Belum Valid, Tingkat Pendidikan Eselon Tidak Memenuhi Syarat, Tahun Pengangkatan PPPK, Tingkat Pendidikan Jabatan Fungsional Tidak Memenuhi Syarat, Pelaksana Nama Jabatan
--	--

	Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Di bawah Pangkat Minimal; dan 4. Data ASN yang konsisten yaitu data Pegawai ASN selaras dan memiliki hubungan keterpadanan. Komponen yang dinilai diantaranya Komponen TMT CPNS pada NIP PNS, Komponen Tanggal Lahir pada NIP ASN, Komponen Jenis Kelamin pada NIP ASN, dan Komponen Tahun Pengangkatan NI PPPK. Predikat Indeks Kualitas Data ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100; 2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99; 3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99; 4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99; dan 5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah. Pengukuran ditargetkan untuk seluruh Instansi Pemerintah Pusat.
Formula	Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data. Formula : $Realisasi = \left(\frac{X}{Y} \right) \times 100\%$ X = Jumlah Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data Y = Jumlah Instansi Pemerintah Pusat
Tujuan	Mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat

	dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi pakaikan antar Instansi Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan meningkatnya kualitas data ASN dapat mendorong maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Nilai Indeks Kualitas Data Instansi Pemerintah Pusat yang dikeluarkan/hasil pengukuran oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	

Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam dimensi indeks kualitas data Instansi Pemerintah Pusat.			

IKK 6. Persentase Ketersediaan Statistik Profil ASN yang Akurat dan Terkini

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Ketersediaan Statistik Profil ASN yang Akurat dan Terkini
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan tingkat ketersediaan data statistik Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target penyediaan yang telah ditetapkan. Ketersediaan statistik Profil ASN mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menyiapkan, mengelola, menyajikan, serta menjamin kualitas data ASN secara berkesinambungan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan manajemen ASN.

Formula	Diukur dengan membandingkan jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan data statistik Profil ASN dengan jumlah kebutuhan penyediaan data statistik profil ASN, kemudian dikalikan seratus persen. Formula : $= \left(\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan data statistik Profil ASN}}{\text{Jumlah kebutuhan penyediaan data statistik Profil ASN}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk: 1. Menjamin ketersediaan data statistik Profil ASN yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan manajemen ASN. 2. Mendorong konsistensi penyediaan data statistik Profil ASN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 3. Mendukung upaya mewujudkan keterbukaan informasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan data ASN.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Database Sistem Informasi ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Menetapkan mekanisme pemutakhiran data ASN secara rutin melalui koordinasi dengan unit pengelola kepegawaian di Instansi Pemerintah.			

IKK 7. Persentase Pemenuhan Kajian Analisis Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kajian Analisis Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN
Deskripsi Indikator	Indikator menggambarkan tingkat pencapaian penyelesaian kajian analisis kebijakan teknis di bidang

Kinerja Kegiatan	pengelolaan data dan penyajian informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan rencana kerja tahunan. Kajian analisis kebijakan teknis dimaksud adalah hasil telaahan, analisis, atau rekomendasi kebijakan yang disusun secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola data serta penyajian informasi ASN. Indikator ini mencerminkan kinerja unit kerja dalam melaksanakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data ASN.
Formula	Diukur dengan membandingkan jumlah kajian analisis kebijakan teknis yang telah diselesaikan dalam periode satu tahun dengan jumlah kajian yang direncanakan dalam rencana kerja tahunan, kemudian dikalikan seratus persen. Formula : $= \left(\frac{\text{Jumlah kajian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kajian yang direncanakan}} \right) \times 100\%$ Jumlah Kajian yang Diselesaikan adalah jumlah dokumen kajian analisis kebijakan teknis yang telah disusun dan ditetapkan sesuai standar mutu serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Jumlah Kajian yang Direncanakan adalah jumlah kajian analisis kebijakan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja tahunan unit kerja.
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk: 1. Mendukung perumusan kebijakan pengelolaan ASN melalui kajian analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.

	2. Mendorong standarisasi dan konsistensi terhadap kualitas tata kelola data ASN. 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data ASN. 4. Mendorong inovasi dalam manajemen ASN untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kebijakan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Database Sistem Informasi ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	

Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Memperkuat koordinasi dengan unit produsen data dan kolaborator data, menerapkan verifikasi dan validasi data sebelum analisis.			

IKK 8. Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan tingkat pencapaian unit kerja dalam menyelesaikan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam satu tahun. Pemenuhan kebijakan teknis tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai ASN untuk mendukung manajemen ASN yang akuntabel dan berbasis data.
Formula	Diukur dengan membandingkan jumlah kebijakan teknis yang diselesaikan dalam periode satu tahun dengan jumlah kebijakan teknis yang direncanakan dalam

	dokumen rencana kerja tahunan, kemudian dikalikan seratus persen. Formula : $= \left(\frac{\text{Jumlah kebijakan teknis yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kebijakan teknis yang direncanakan}} \right) \times 100\%$ Jumlah Kebijakan Teknis yang Diselesaikan adalah jumlah dokumen kebijakan teknis yang telah selesai disusun, ditetapkan, dan dapat diimplementasikan. Jumlah Kebijakan Teknis yang Direncanakan adalah jumlah kebijakan teknis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan unit kerja.			
Tujuan	Kebijakan teknis dimaksud bertujuan menjadi pedoman dan standar nasional bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Data pegawai ASN secara sistematis terukur dan berkesinambungan serta mendukung peningkatan kualitas data ASN sebagai dasar penerapan sistem merit dan manajemen ASN berbasis data.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	

Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	- Peraturan-Peraturan terkait Layanan Manajemen ASN - Framework terkait tata kelola data			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	Penyusunan perencanaan yang terukur, koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, serta monitoring progres secara periodik.			

IKK 8. Persentase Kegiatan Statistik ASN Disabilitas Nasional

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kegiatan Statistik ASN Disabilitas Nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kegiatan statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada tingkat nasional sesuai dengan rencana kerja tahunan. Kegiatan statistik ASN disabilitas dimaksud adalah serangkaian aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, serta publikasi data statistik terkait ASN penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk mendukung perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pengelolaan ASN secara inklusif. Indikator ini mencerminkan kinerja unit kerja dalam menyiapkan, menyelenggarakan, serta menjamin kualitas data dan informasi ASN disabilitas secara nasional.
Formula	Diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan statistik ASN disabilitas yang terealisasi dalam satu tahun dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam dokumen rencana kerja tahunan, kemudian dikalikan seratus persen. Formula : $= \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan statistik ASN disabilitas yang direalisasikan}}{\text{Jumlah Kegiatan Statistik ASN Disabilitas yang direncanakan}} \times 100\% \right)$ Jumlah Kegiatan Statistik ASN Disabilitas yang Direalisasikan adalah jumlah kegiatan statistik ASN disabilitas yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memenuhi standar kualitas data. Jumlah Kegiatan Statistik ASN Disabilitas yang

	Direncanakan adalah jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan unit kerja.			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk: 1. Menjamin tersedianya data statistik ASN disabilitas yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mendukung kebijakan pengelolaan ASN dengan memperhatikan kebutuhan ASN penyandang disabilitas. 3. Mendukung penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Data Penyandang Disabilitas yang dikelola oleh Kementerian Sosial			

Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola data penyandang disabilitas, menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi data.			

IKK 10. Persentase Dukungan Pemanfaatan Data ASN bagi Dukungan Program Prioritas Nasional

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Dukungan Pemanfaatan Data ASN bagi Dukungan Program Prioritas Nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator menggambarkan tingkat keterlibatan dan dukungan unit kerja dalam pemanfaatan data Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional maupun prioritas pemerintah. Dukungan pemanfaatan data ASN dimaksud adalah penyediaan, sinkronisasi, pengelolaan, serta penyajian

	data ASN yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kebutuhan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas nasional maupun prioritas pemerintah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana data ASN dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung capaian pembangunan nasional.
Formula	Diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan program prioritas nasional maupun prioritas pemerintah yang telah memperoleh dukungan pemanfaatan data ASN dan terealisasi dalam periode satu tahun dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja tahunan, kemudian dikalikan seratus persen. Formula : $\left(\frac{\text{Jumlah kegiatan program prioritas nasional/pemerintah yang terealisasi}}{\text{Jumlah kegiatan program prioritas nasional/pemerintah yang direncanakan}} \times 100\% \right)$ Jumlah Kegiatan Program Prioritas Nasional/Pemerintah yang Terealisasi adalah jumlah kegiatan prioritas nasional/pemerintah yang berhasil didukung melalui penyediaan dan pemanfaatan data ASN. Jumlah Kegiatan Program Prioritas Nasional/Pemerintah yang Direncanakan adalah jumlah kegiatan prioritas nasional/pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan memerlukan dukungan data ASN.
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk: 1. Menjamin ketersediaan data ASN yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah.

	2. Mendorong keterpaduan tata kelola data ASN dengan arah pembangunan nasional. 3. Meningkatkan peran unit kerja sebagai penyedia data strategis dalam mendukung perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas nasional.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Laporan Kegiatan Program Prioritas Nasional			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan

Mitigasi Risiko	Penyesuaian secara cepat melalui fleksibilitas perencanaan dan koordinasi lintas sektor.
-----------------	--

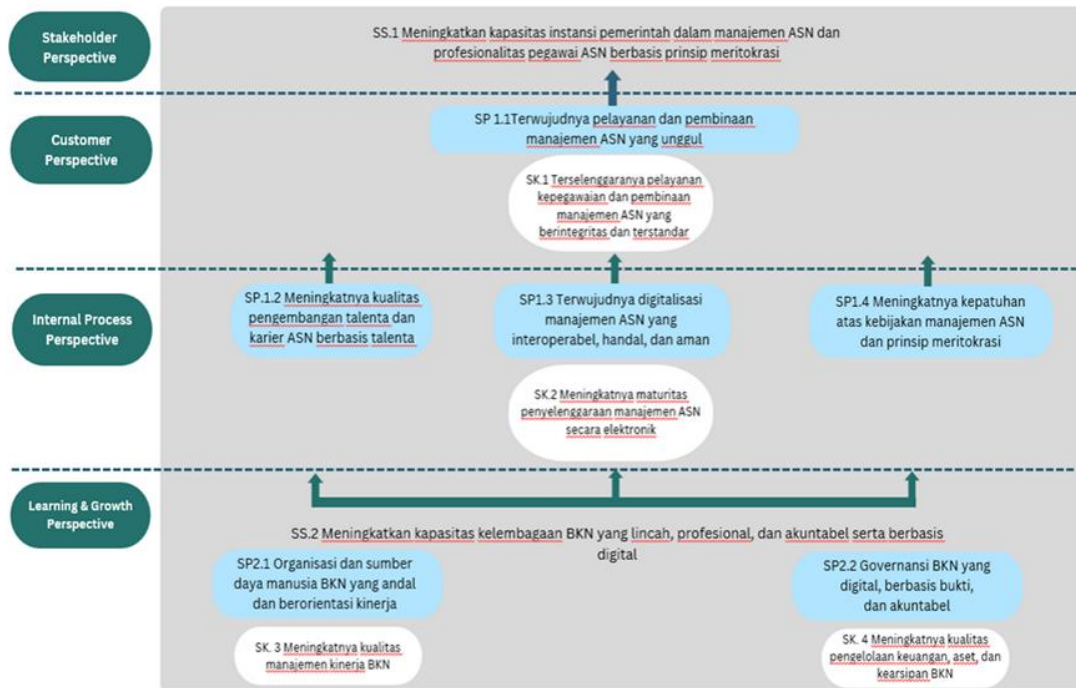


MANUAL IKU TAHUN 2025 – 2029

REVISI TAHUN 2026

Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi
dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

Peta Strategi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029



INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN DIGITALISASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK.1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK.2	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan	Paket	1	1	1	1	1

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

			Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara						
		IKK.3	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	90	95	95	95	95
SK.2	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik	IKK.4	Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN	Persentase	50	65	80	100	100
		IKK.5	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritokrasi dan Pengawasan NSPK	Persentase	90	100	100	100	100
		IKK.6	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK.7	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100

			untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN						
		IKK.8	Jumlah Paket Keterpaduan Data ASN dengan Data Geospasial	Paket	1	1	1	1	1
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.9	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	99	99	99	99	99
		IKK.10	Rasio Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK / Inspektorat di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN	Rasio	0	0	0	0	0

IKK 1. Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan

	dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.			
Formula	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN			

	Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	Rendahnya partisipasi instansi dalam kegiatan pembinaan			
Mitigasi Risiko	- Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi - Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri - Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. - Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. - Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKK 2. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.			
Formula	Diukur berdasarkan jumlah inovasi yang direalisasikan dibandingkan dengan jumlah paket inovasi yang direncanakan. Formula : $Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Inovasi yang direalisasikan}}{\text{Jumlah Inovasi yang direncanakan}} \right)$			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome	☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Inovasi Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	Perencanaan inovasi tidak realistis atau tidak berbasis kebutuhan pengguna layanan.			
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKK 3. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.			
Formula	Diukur berdasarkan jumlah surat yang dijawab tepat waktu dibandingkan dengan jumlah surat yang dijawab. Formula : $Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah surat yang dijawab tepat waktu}}{\text{Jumlah surat yang dijawab}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Surat memerlukan analisis teknis mendalam atau pertimbangan kebijakan yang memakan waktu			
Mitigasi Risiko	Menetapkan klasifikasi jenis surat (reguler, teknis, kebijakan) dengan SLA berbeda, serta memastikan komunikasi sementara kepada pengirim mengenai status penanganan surat.			

IKK 4. Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan keterhubungan Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Database BKN untuk Data Riwayat Profil ASN pada Layanan Digital Manajemen ASN, yang diukur dengan rata-rata capaian progress keterhubungan data riwayat profil asn dari seluruh instansi. Adapun progress keterhubungan dilihat dari pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data. Data Riwayat Profil ASN yang diukur yaitu : 1. Riwayat Golongan 2. Riwayat Jabatan 3. Riwayat Pendidikan 4. Riwayat Diklat 5. Riwayat Kinerja 6. Riwayat Kompetensi 7. Riwayat Potensi 8. Riwayat Hukuman Disiplin 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala 10. Riwayat Keluarga 11. Riwayat Penghargaan

	Parameter instansi dinyatakan telah terhitung terintegrasi adalah dengan melihat keterhubungan datanya yang diukur dengan capaian persentase pemutakhiran data masing-masing riwayat profil ASN sesuai dengan persentase minimal sebagai berikut: 1. Riwayat Golongan : 20% 2. Riwayat Jabatan : 30% 3. Riwayat Pendidikan : 11% 4. Riwayat Diklat : 30% 5. Riwayat Kinerja : 100% 6. Riwayat Kompetensi : 8% 7. Riwayat Potensi : 8% 8. Riwayat Hukuman Disiplin : 0.1% 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala : 25% 10. Riwayat Keluarga : 10% 11. Riwayat Penghargaan : 0.1% Persentase masing-masing riwayat ditentukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Tren rata-rata persentase instansi didalam melakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN melalui pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem selama tahun 2023-2024 2. Kewajiban instansi didalam pelaporan riwayat kinerja akhirnya Persentase masing-masing riwayat pada setiap instansi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah dilakukan pemutakhiran data riwayat profil ASN nya dengan jumlah ASN pada instansi tersebut.
Formula	<i>Realisasi</i> $= \left(\frac{Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11}{11} \right)$

	1. Riwayat Golongan $Z1 = \left(\frac{X1}{Y1}\right) \times 100\%$ X1 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat golongan Y1 = Jumlah Instansi Pemerintah Z1 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat golongan 2. Riwayat Jabatan $Z2 = \left(\frac{X2}{Y2}\right) \times 100\%$ X2 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat jabatan Y2 = Jumlah Instansi Pemerintah Z2 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat jabatan 3. Riwayat Pendidikan $Z3 = \left(\frac{X3}{Y3}\right) \times 100\%$ X3 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat pendidikan Y3 = Jumlah Instansi Pemerintah
--	---

	Z3 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat pendidikan 4. Riwayat Diklat $Z4 = \left(\frac{X4}{Y4} \right) \times 100\%$ X4 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat diklat Y4 = Jumlah Instansi Pemerintah Z4 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat diklat 5. Riwayat Kinerja $Z5 = \left(\frac{X5}{Y5} \right) \times 100\%$ X5 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kinerja Y5 = Jumlah Instansi Pemerintah Z5 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kinerja
--	--

	6. Riwayat Kompetensi $Z6 = \left(\frac{X6}{Y6} \right) \times 100\%$ X6 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kompetensi Y6 = Jumlah Instansi Pemerintah Z6 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kompetensi 7. Riwayat Potensi $Z7 = \left(\frac{X7}{Y7} \right) \times 100\%$ X7 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat potensi Y7 = Jumlah Instansi Pemerintah Z7 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat potensi 8. Riwayat Hukuman Disiplin $Z8 = \left(\frac{X8}{Y8} \right) \times 100\%$ X8 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat hukuman disiplin Y8 = Jumlah Instansi Pemerintah
--	---

	Z8 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat hukuman disiplin 9. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala $Z9 = \left(\frac{X9}{Y9} \right) \times 100\%$ X9 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kenaikan gaji berkala Y9 = Jumlah Instansi Pemerintah Z9 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat kenaikan gaji berkala 10. Riwayat Keluarga $Z10 = \left(\frac{X10}{Y10} \right) \times 100\%$ X10 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat keluarga Y10 = Jumlah Instansi Pemerintah Z10 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat keluarga
--	---

	11. Riwayat Penghargaan $Z11 = \left(\frac{X11}{Y11} \right) \times 100\%$ X11 = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat penghargaan Y11 = Jumlah Instansi Pemerintah Z11 = Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pemanfaatan sistem dan interoperabilitas sistem dalam melakukan pemutakhiran data pada riwayat penghargaan			
Tujuan	Terlaksananya Integrasi Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan satu data ASN sehingga menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN, sehingga dapat mendorong maturitas penyelenggaraan Manajemen ASN secara elektronik			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Hasil perhitungan Tingkat Interoperabilitas Sistem Informasi ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	Adanya penambahan dan perubahan proses bisnis pada sistem informasi kepegawaian yang mempengaruhi proses Interoperabilitas Sistem Informasi ASN			
Mitigasi Risiko	Pendampingan dan evaluasi secara berkala perihal proses Integrasi			

IKK 5. Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritokrasi dan Pengawasan NSPK

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritokrasi dan Pengawasan NSPK
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan layanan digital manajemen ASN yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk memastikan penerapan prinsip sistem merit serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Manajemen ASN. Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN yang dimaksud adalah Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan pada : 1. Layanan Perencanaan Kebutuhan 2. Layanan Peremajaan Data 3. Layanan Kinerja 4. Layanan Manajemen Kinerja Organisasi 5. Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian 6. Layanan Pemberhentian 7. Layanan Kenaikan Pangkat 8. Layanan Kenaikan Jabatan

	9. Layanan Pencantuman Gelar dan Peninjauan Masa Kerja 10. Layanan Manajemen Talenta 11. Layanan Portal ASN Karir 12. Layanan I-Mut 13. Layanan Sistem Penilaian Maturitas Manajemen Talenta (SMARTA) 14. Layanan Penilaian Indeks Sistem Merit (PINTER) 15. Layanan Integritas dan Moralitas 16. Layanan Integrated Discipline (IDIS) 17. Layanan BPASN 18. Layanan Kompetensi
Formula	Diukur berdasarkan persentase pengelolaan jumlah fitur layanan manajemen ASN yang terealisasi. Formula : $Z = \left(\frac{X}{Y} \right) \times 100\%$ Z = Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritroksi dan Pengawasan NSPK X = Jumlah Realisasi Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritroksi dan Pengawasan NSPK Y = Jumlah Target Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Penguatan Sistem Meritroksi dan Pengawasan NSPK
Tujuan	1. Mengelola layanan digital manajemen ASN secara efektif dan berkelanjutan; 2. Menjamin penerapan sistem merit (berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja);

	3. Memfasilitasi fungsi pengawasan dan evaluasi NSPK melalui data dan sistem digital.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Hasil pengukuran pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	- Tidak adanya sistem evaluasi berkala atas efektivitas layanan digital			

	- Perubahan arah kebijakan pemerintah atau NSPK yang berdampak pada layanan digital - Kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data ASN
Mitigasi Risiko	- Pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN - Pemantauan regulasi dan kebijakan, mekanisme adaptasi cepat - Implementasi multi-factor authentication

IKK 6. Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan layanan digital manajemen ASN yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN yang dimaksud adalah Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan pada : 1. Layanan Sistem Seleksi 2. Layanan Pindah Instansi
Formula	Diukur berdasarkan persentase pengelolaan jumlah fitur layanan manajemen ASN yang terealisasi. Formula : $Z = \left(\frac{X}{Y} \right) \times 100\%$ Z = Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah X = Jumlah Realisasi Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah

	Y = Jumlah Target Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah			
Tujuan	Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN dengan pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data, sehingga diharapkan mendukung dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Hasil pengukuran pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	

Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	- Tidak adanya sistem evaluasi berkala atas efektivitas layanan digital - Kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data ASN			
Mitigasi Risiko	- Pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN - Implementasi multi-factor authentication			

IKK 7. Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan layanan digital manajemen ASN yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dalam mendukung terwujudnya interaksi digital antar ASN maupun antara ASN dengan sistem manajemen ASN secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN yang dimaksud adalah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan pada Layanan MyASN
Formula	Diukur berdasarkan persentase pengelolaan jumlah fitur layanan manajemen ASN yang terealisasi. Formula : $Z = \left(\frac{X}{Y} \right) \times 100\%$ Z = Persentase Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN X = Jumlah Realisasi Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN

	Y = Jumlah Target Pengembangan dan atau Pemeliharaan Layanan Digital Manajemen ASN untuk Pemenuhan Dukungan Interaksi Digital ASN			
Tujuan	Pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN dengan pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data, sehingga diharapkan mendukung terwujudnya interaksi digital ASN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Hasil pengukuran pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	

Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	- Tidak adanya sistem evaluasi berkala atas efektivitas layanan digital - Kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data ASN			
Mitigasi Risiko	1. Pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam pengelolaan Layanan Digital Manajemen ASN 2. Implementasi multi-factor authentication			

IKK 8. Persentase Paket Keterpaduan Data ASN dengan Data Geospasial

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Paket Keterpaduan Data ASN dengan Data Geospasial
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan keterpaduan informasi mengenai data Aparatur Sipil Negara yang dipadukan dengan data geospasial (informasi berbasis lokasi/ruang). Keterpaduan data ASN dengan Data Geospasial tersebut disajikan melalui Layanan DES Command Centre. Paket Keterpaduan data ASN dengan Data Geospasial yang direncanakan adalah : 1. Sebaran Progres Mutasi ASN 2. Sebaran Progres Pencantuman Gelar 3. Sebaran Progres Peninjauan Masa Kerja 4. Sebaran Progres Hukuman Disiplin (IDIS)
Formula	Diukur berdasarkan jumlah keterpaduan data ASN dengan data geospasial yang direalisasikan dibandingkan dengan jumlah keterpaduan data ASN dengan data geospasial yang direncanakan. Formula : $\text{Realisasi} = \left(\frac{\text{Jumlah keterpaduan data ASN dgn data Geospasial yang direalisasikan}}{\text{Jumlah keterpaduan data ASN dgn data Geospasial yang direncanakan}} \right)$

Tujuan	Mendukung perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan layanan publik berbasis lokasi.			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Layanan DATASENA			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	- Ketidaksesuaian referensi spasial antar sumber data - Keterbatasan kualitas dan kelengkapan data ASN			

Mitigasi Risiko	- Penggunaan sistem referensi geospasial nasional (SRGI) dan Mengacu pada referensi spasial resmi dari BIG - Peningkatan koordinasi dengan instansi pengelola data ASN dan Penerapan standar metadata dan format data ASN nasional
--------------------	--

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SIDIGI TAHUN 2025 - 2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK. 1	Terselenggara nya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK. 1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN	Persen- tase	-	100	100	-	-
		IKK. 2	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Indeks	94	94,25	94,50	94,75	95
		IKK. 3	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Paket	1	1	1	1	1
		IKK. 4	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi	Persen- tase	90	95	95	95	95

			dan Digitalisasi Manajemen ASN						
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK. 2	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK. 5	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100
		IKK. 6	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Indeks	70	74	74.25	74.50	74.75
		IKK. 7	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	100	100	100	100	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK. 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK. 8	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Persentase	99	99	99	99	99
		IKK. 9	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2026 di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN	Rasio	0	0	0	0	0

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI
MANAJEMEN ASN

IKK 1. Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi. Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di kelompok kerja yang telah ditetapkan.

Formula	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	

Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

IKK 2. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
Formula	Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

	<i>Realisasi = rata – rata IKM layanan dan pembinaan</i> <i>IKM = SKM x 25</i> Dimana: <i>IKM = Indeks kepuasan masyarakat</i> <i>SKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</i> <i>Nilai penimbang = $\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}$, jumlah bobot = 1</i> Kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: A = 88,31 - 100 (Sangat Baik) B = 76,61 - 88,30 (Baik) C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik) D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN oleh BKN.			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			

Jenis Perhitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir		☒ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan survei, memperluas cakupan responden secara proporsional antar segmen pengguna layanan, dan menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan PermenPANRB. 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan survei sejak awal tahun, membangun sistem pemantauan progres pelaksanaan survei, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengolahan data.			

IKK 3. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Sekretariat Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di lingkungan Sekretariat Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah inovasi layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Inovasi yang direalisasikan}}{\text{Jumlah Paket Inovasi yang direncanakan}} \right)$			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan inovasi unit kerja			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKK 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Mengukur kecepatan dan ketepatan layanan persuratan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah surat yang dijawab tepat waktu}}{\text{Jumlah surat yang dijawab}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Menetapkan klasifikasi jenis surat (reguler, teknis, kebijakan) dengan SLA berbeda, serta memastikan komunikasi sementara kepada pengirim mengenai status penanganan surat.			

IKK 5. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi.			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Telah Terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Menetapkan sistem pelaporan berkala, memastikan dokumentasi bukti dukung terkelola dengan baik, dan melaksanakan monitoring triwulanan.			

IKK 6. Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN																								
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.																								
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi AKIP di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN																								
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah gambaran nilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.																								
Formula	Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut: <table><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI ANGKA</th><th>INTERPRETASI</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang
KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI																							
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																							
A	>80-90	Memuaskan																							
BB	>70-80	Sangat Baik																							
B	>60-70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30-50	Kurang																							
D	>0-30	Sangat Kurang																							

Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; dan 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome	☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan

Mitigasi Risiko	Menetapkan jadwal penyusunan laporan kinerja (LKj) yang disiplin, serta menerapkan mekanisme revidi berjenjang oleh pejabat penanggung jawab kinerja.
-----------------	---

IKK 7. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian Pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian Pada Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator ini menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.
Formula	Persentase pegawai di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah pegawai yang melaporkan kinerja harian pada e-kinerja}}{\text{Jumlah pegawai}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang kinerja pegawai 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pegawai 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan efektifitas kinerja Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta	() Cascading Non Peta	(√) Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Rekapitulasi pada layanan e-kinerja			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan

Mitigasi Risiko	4. Mengaktifkan notifikasi pengingat harian dan pemberian batas waktu input, serta menerapkan sistem penguncian data setelah periode tertentu. 5. Menetapkan mekanisme pemantauan rutin bagi pejabat penilai melalui laporan rekap harian bagi pimpinan unit.
-----------------	---

IKK 8. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kearsipan BKN.			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Tahun Anggaran 2026.			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang terealisasi}}{\text{Jumlah anggaran yang ditetapkan}} \right) \times 100\%$			
Tujuan	Untuk mengukur keselarasan kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan pemanfaatan anggaran yang direncanakan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	http://spanint.kemenkeu.go.id/ https://sakti.kemenkeu.go.id/			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Menetapkan batas waktu penyampaian dokumen, melakukan monitoring rutin terhadap progres pelaksanaan, dan memberikan pendampingan administrasi keuangan kepada unit pelaksana. 2. Melakukan identifikasi risiko kegiatan sejak tahap perencanaan, menyediakan rencana kontinjensi, dan mempercepat mekanisme revisi jika terdapat perubahan kondisi lapangan.			

IKK 9. Rasio Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan Oleh BPK/ Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kearsipan BKN.			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan Oleh BPK/ Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah temuan hasil audit operasional atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat terhadap total kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang diaudit. Rasio ini mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).			
Formula	$Realisasi = \left(\frac{\text{Jumlah temuan audit}}{\text{Jumlah objek yang diaudit}} \right)$			
Tujuan	Rasio temuan hasil audit digunakan untuk menilai tingkat risiko, kelemahan pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam hal anggaran.			
Satuan Pengukuran	Rasio			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome	☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta	☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN			
Sumber Data	Laporan Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Oleh BPK/Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Menunjuk tim pengelola dokumen audit yang bertanggung jawab atas ketersediaan bukti tindak lanjut. 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas internal pra dan pasca kegiatan			